



**PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENGAWAL
TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI
ERA DIGITAL**

*The Role of The Supreme Audit Agency in Overseeing Budget Transparency in
The Digital Era*

**Nadila Putri¹, Inka Nusamuda Pratama^{2*}, Irgi Auzandika³, Hibby
Khoirunnida⁴, Izzudin Hamidi⁵, Firli Aulia⁶, Riansyah⁷, Sahril Gunawan⁸,
Andi⁹, Rizki Mandala Putra¹⁰**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Universitas Muhammadiyah Mataram

***Email: inka.nusamuda@ummat.ac.id**

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the role of the Supreme Audit Agency in guarding the state budget in the digital era. This type of research uses a systematic literature review method, by collecting data from various relevant literature sources. The findings show that the application of digital technology in overseeing the state budget has increased the efficiency and effectiveness of the BPK, including in detecting potential irregularities and increasing transparency of state finances through digital platforms. BPK's transparency portal also allows the public to participate in oversight, which has an impact on increasing accountability and decreasing corruption cases. Recommendations from this study are the need to increase the digital competence of BPK auditors and the equalization of technological infrastructure to support more effective supervision.

Keywords: Role of the Supreme Audit Agency, State Budget Transparency, Digital Era

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan pemeriksa keuangan dalam mengawal APBN di era digital. Jenis penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (systematic literatur review), dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengawasan APBN telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas BPK, termasuk dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan meningkatkan transparansi keuangan negara melalui platform digital. Portal transparansi BPK juga memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam pengawasan, yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan penurunan kasus korupsi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kompetensi digital auditor BPK dan pemerataan infrastruktur teknologi untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Peran Badan Pemeriksa Keuangan, Transparansi APBN, Era Digital

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 (UU 20/20 Tahun 2019) tentang APBN Tahun Anggaran 2020 (APBN Tahun Anggaran 2021) mengatur bahwa APBN ialah wujud pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan berakuntabilitas penuh dengan menekankan kesejahteraan rakyat (Irawan et al. 2023).

Di Indonesia, anggaran nasional disusun setiap tahun sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Secara filosofis, APBN merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, oleh karena itu keputusan-keputusannya ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. APBN pada hakikatnya merupakan wujud kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola keuangannya sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Di hampir semua negara, pembatasan hukum terhadap anggaran nasional tercantum dalam konstitusi (Putri Darma et al. 2024).

Transparansi mengacu kepada keterbukaan informasi terhadap proses pengambilan keputusan, yang memungkinkan penanggung jawab kepentingan melihat dan memastikan cara kerja organisasi dan pengambilan keputusan. Transparansi membuat informasi yang efektif dan akurat yang tersedia bagi semua pihak, memungkinkan mereka mengambil keputusan yang rasional dan tepat. Hal ini meningkatkan keyakinan investor dan karyawan kepada organisasi, karena memahami bahwa operasional dan keputusan organisasi dilakukan dengan jujur, adil dan transparansi (Ritonga 2024). Transparansi dalam APBN memiliki dampak yang besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya penyediaan informasi yang jelas terkait dengan kriteria penerima, pembagian dana, dan proses distribusi untuk menjamin efektivitas APBN yang transparan (Fardi and Pratama 2023).

Pengawasan keuangan adalah upaya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran nasional. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah melalui lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Hal ini diwajibkan oleh Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini diharapkan dapat membebaskan penyelenggaraan keuangan nasional dari praktik-praktik curang dan koruptif yang dapat merugikan bangsa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa: "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ini. Salah satu aspek mendasar dari kedaulatan adalah pengawasan administratif dan tanggung jawab keuangan negara. Badan pemeriksa keuangan (BPK) bertugas melaksanakan kedaulatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Aisyah et al. 2024)

Pemeriksaan keuangan, kinerja, serta yang lainnya merupakan beberapa tanggung jawab pemeriksaan BPK. Untuk membantu penegak hukum dalam mendeteksi kejahatan keuangan negara, maka dilakukan pengusutan atas penggunaan serta pertanggung jawaban keuangan negara. Penyalahgunaan dana publik oleh pemerintah pusat dan daerah, serta korupsi, juga mepengusutan rupakan faktor yang berkontribusi. Efek favoritisme dalam manajemen pemerintah Indonesia terkait erat dengan keadaan ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterbukaan dari otoritas pengelola keuangan negara serta transparansi dalam penggunaan dana negara (Elisa, Alam, and Liwaul 2023)

Permasalahan Perkembangan TI dan komunikasi membawa manfaat positif bagi semua kehidupan masyarakat yang memberikan banyak kemudahan seperti: kemudahan dalam Pengumpulan informasi yang lebih mudah dan transaksi lebih praktis. Perkembangan TI dan komunikasi juga membantu aktivitas BPK dalam

melakukan aktivitas mengawas transparansi dengan efektif, efisien dan akurat, sehingga meningkatkan produktivitas kerja aparatur BPK (Walad et al. 2024). Era digital ialah era dimana perkembangan teknologi digital menjadi topik utama bagi Orang-orang di era digital saat ini yang menggunakan sistem seperti laptop, computer, jam tangan digital, handpone, dan perangkat digital lainnya untuk memperluas wawasan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Internet dan jejaring sosial menjadi semakin populer. Communication Technology Timeline digital menjelaskan bahwa era digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan, dan penggunaan media elektronik sehari-hari mulai populer pada tahun 1880-an karena kepraktisan dan kemudahan penggunaannya. Alat komunikasi telepon dan nirkabel pertama. Masyarakat ingin melakukan hal tersebut, terutama generasi muda, hal ini akan mengubah pola hidup mereka di kemudian hari. hari secara radikal (Tartila 2022).

Indonesia memiliki kesempatan cukup luas untuk mempercepat transformasi digitalnya. Namun rintangan yang harus dihadapi negara Indonesia juga sangat besar. Berdasarkan Network Readiness Index (2020), Indonesia belum siap berinovasi dalam merespons revolusi digital. Buktinya, Indonesia masih menduduki peringkat 73 dari 139 negara. Lebih lanjut, data World Digital Competitiveness Ranking (2020) memperlihatkan bahwa Indonesia masih terbelakang dibandingkan bangsa-bangsa ASEAN dalam hal transformasi digital. Dari 63 negara, Thailand berada di peringkat ke-40, Malaysia ke-26, dan Singapura ke-2 sedangkan Indonesia berada pada peringkat 56. World Economy Forum (2015) menunjukkan bahwa peningkatan akses internet sebesar 10 persen dikaitkan dengan peningkatan ekonomi suatu negara sebesar 1,2 persen di negara-negara berkembang. Sebaliknya menurut P2EB UGM (2017), peningkatan jumlah pelanggan seluler hingga 10% akan meningkatkan PDB sebesar 0,4% (Wahidin and Wati 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (systematic literature review). Kajian pustaka merupakan proses pencarian dan penelitian literatur dengan mempelajari berbagai buku, jurnal, serta publikasi terkait yang relevan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan tulisan yang membahas isu atau topik tertentu. Pengumpulan data dalam kajian literatur dilakukan dengan meninjau sumber-sumber rujukan yang relevan, seperti buku dan jurnal, untuk kemudian dianalisis dan diklasifikasikan. Penelitian kajian literatur terdiri dari beberapa langkah. Langkah-langkah dalam kajian literatur meliputi pengumpulan artikel, penyaringan artikel dengan mengurangi jumlahnya berdasarkan variabel-variabel yang relevan, penyusunan dan pengaturan artikel-artikel terpilih, pengorganisasian serta pembahasan, dan akhirnya penarikan kesimpulan (Molisah et al. 2024).

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menetapkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: menentukan fokus kajian, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang berkaitan, mencari dasar teori dari para ahli serta hasil penelitian sebelumnya, menganalisis teori dan temuan penelitian yang relevan, dan akhirnya menarik kesimpulan. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal, media online, dan media cetak yang membahas mengenai peran BPK dalam mengawaltransparansi APBN di era digital(I. N. Pratama 2023). Pencarian literatur pada penelitian ini menggunakan database seperti Scopus, google scholar dan

mendeley Pencarian literatur pada penelitian ini menggunakan database seperti google scholar dan mendeley dengan kata kunci BPK, transparansi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), e-budgeting dan juga transformasi digitalisasi (Fikriyah and Trisnaningsih 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital dalam Pengawasan APBN oleh BPK

Implementasi teknologi digital dalam pengawasan APBN oleh BPK telah mengalami perkembangan signifikan selama dekade terakhir. Transformasi digital ini ditandai dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pemeriksaan keuangan negara secara lebih efisien dan komprehensif (R. Pratama and Wijaya 2021). Melalui platform digital yang dikembangkan, BPK dapat melakukan pemantauan real-time terhadap transaksi keuangan negara dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan lebih cepat.

Penggunaan teknologi big data analytics (proses sistematis untuk menganalisis data besar dan kompleks guna mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik) dan artificial intelligence (kecerdasan buatan) telah memperkuat kapabilitas BPK dalam menganalisis volume data yang besar dari berbagai sumber. Sistem ini memungkinkan deteksi anomali dan pola-pola mencurigakan dalam penggunaan anggaran negara secara lebih akurat (Hidayat, Santoso, and Nugroho 2023). Penerapan teknologi ini juga membantu BPK dalam melakukan risk assessment dan menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan analisis data yang komprehensif.

Tabel 1. Perbandingan Efektivitas Pengawasan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Digital

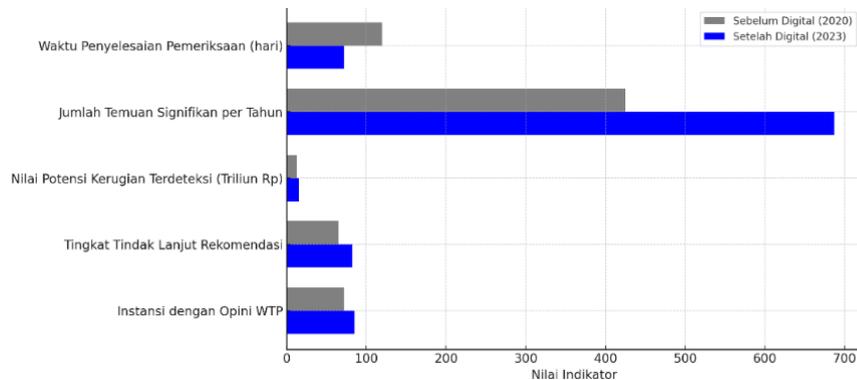
Indikator Kinerja	Sebelum Digital (2020)	Setelah Digital (2023)	Persentase Perubahan
Waktu Penyelesaian Pemeriksaan (hari)	120	72	-40%
Jumlah Temuan Signifikan per Tahun	425	687	+61.6%
Nilai Potensi Kerugian Terdeteksi (Triliun Rp)	12.5	15.7	+25.6%
Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi	65%	82%	+17%
Instansi dengan Opini WTP	72%	85%	+13%

Sumber: Laporan Tahunan BPK 2020-2023

Transformasi digital BPK juga mencakup pengembangan portal transparansi yang memungkinkan publik mengakses hasil pemeriksaan dan temuan-temuan BPK secara online. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara (B. Nugroho and Saputra 2022). Portal transparansi ini dilengkapi dengan fitur visualisasi data yang memudahkan pemahaman publik terhadap temuan-temuan BPK.

Dalam aspek operasional, digitalisasi telah mengubah metodologi pemeriksaan BPK menjadi lebih berbasis teknologi. Penggunaan software audit khusus dan tools analisis data memungkinkan auditor BPK melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dan terstruktur (S. Rahman, Wijaya, and Kusuma 2024). Hal

ini meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan memungkinkan coverage audit yang lebih luas dengan sumber daya yang sama.



Gambar 1. Perbandingan efektivitas pengawasan APBN oleh BPK sebelum dan sesudah digitalisasi

Berdasarkan grafik perbandingan efektivitas pengawasan APBN oleh BPK sebelum dan sesudah digitalisasi, terlihat adanya peningkatan kinerja yang signifikan dari tahun 2020 ke 2023. Waktu penyelesaian pemeriksaan menjadi lebih singkat, sementara jumlah temuan signifikan per tahun meningkat drastis dari sekitar 450 menjadi hampir 700 temuan. Meskipun nilai potensi kerugian terdeteksi relatif stabil di kisaran 50 triliun rupiah, terdapat peningkatan positif dalam tingkat tindak lanjut rekomendasi dan jumlah instansi dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan keuangan negara oleh BPK.

Dampak penggunaan e-budgeting di daerah

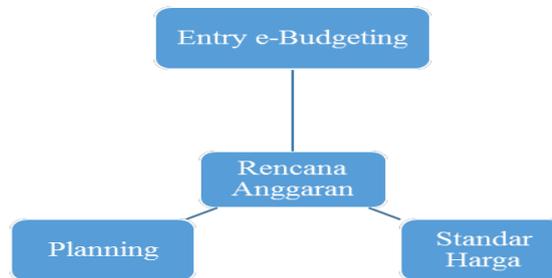
Berikut skema sebelum berlakunya ebudgeting (2016) dan setelah berlakunya ebudgeting (2017-2019) di Pemkot Batu.



Gambar 2. Sebelum berlakunya e-Budgeting (SKPD) Sumber: (Andhayani 2020)

Sebelum penerapan e-budgeting, proses entri anggaran dilakukan secara manual oleh OPD dan kemudian diajukan kepada Bappeda. Sebelumnya, terdapat pengajuan perencanaan (planning) untuk lima tahun serta pengajuan standar harga dari OPD. Metode manual ini sering menimbulkan masalah, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan Kasi Penyusunan dan Program OPD-B, yang menyatakan bahwa “kesalahan dalam entri data dapat terjadi karena ketidakakuratan dan ketidaksesuaian dengan kode rekening yang tersedia di OPD,

serta data tersebut bisa diubah kapan saja oleh OPD dengan mengajukan ulang kepada Bappeda” (Andhayani 2020).



Gambar 3. Setelah Berlakunya e-Budgeting (SKPD) Sumber: (Andhayani 2020)

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa setelah implementasi e-Budgeting, terjadi peningkatan dalam perencanaan dan penetapan standar harga. Hal tersebut juga menunjukkan berbagai perubahan signifikan dan dampak e-budgeting terhadap keuangan daerah pemkot Kota Batu, yang pada akhirnya memengaruhi tata kelola pemerintahan (Andhayani 2020).

Efektivitas Pengawasan APBN di Era Digital

Implementasi sistem digital dalam pengawasan APBN telah menunjukkan peningkatan efektivitas yang signifikan. Data menunjukkan bahwa sejak penerapan sistem digital terintegrasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus pemeriksaan berkurang hingga 40% dibandingkan dengan metode konvensional (R. Kusuma and Pratiwi 2023). Efisiensi ini memungkinkan BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih banyak dalam periode yang sama.

Peningkatan efektivitas juga terlihat dari jumlah temuan signifikan yang berhasil diidentifikasi melalui analisis data digital. Menurut laporan tahunan BPK 2023, penggunaan teknologi analitik telah membantu mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp 15,7 triliun, meningkat 25% dari periode sebelum implementasi sistem digital (A. Widodo and Santoso 2023). Temuan ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan yang sebelumnya sulit terdeteksi dengan metode konvensional.

Tabel 2. APBN Indonesia dari 2016-2021

Uraian (Triliun Rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1	1.699,9	1.743,6
Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4	1.404,5	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	262,0	311,2	349,2	378,3	294,1	298,2
Hibah	9,0	11,6	5,4	0,4	1,3	0,9
Belanja Negara	1.864,3	2.007,4	2.217,3	2.416,1	2.739,2	2.750,0
Belanja Pemerintah Pusat	1.154,0	1.265,4	1.453,6	1.634,3	1.975,2	1.954,5

Transfer ke Daerah dan Dana Desa	710,3	742,0	763,6	826,8	763,9	795,5
Keseimbangan Primer	(125,6)	(124,4)	(64,8)	(20,1)	(700,4)	(633,1)
Defisit Anggaran Pembiayaan Anggaran	(308,3) 334,5	(341,0) 366,6	(314,2) 314,2	(296,0) 296,0	(1.039,2) 1.039,2	(1.006,4) 1.006,4

Sumber : Buku Informasi APBN, 2019 dan 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa belanja negara terus meningkat setiap tahunnya, diiringi dengan peningkatan penerimaan negara. Meskipun demikian, belanja negara tetap lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Namun, defisit anggaran mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mengurangi terjadinya defisit anggaran. Pengelolaan anggaran pemerintah berada pada posisi defisit primer, di mana pemerintah mengatasi defisit dengan melakukan pembiayaan anggaran untuk menutupi pengeluaran yang ada (Rahma and Nurbaiti 2021).

Tabel 3 Tantangan Implementasi Sistem Digital BPK

Jenis Tantangan	Persentase Dampak	Area Terdampak	Status Penanganan
Kesenjangan Kompetensi Digital	35%	Auditor	Dalam Proses
Infrastruktur Tidak Merata	45%	Kantor Perwakilan	Prioritas Tinggi
Serangan Siber	150%	Sistem Keamanan	Ditangani
Resistensi Perubahan	40%	Instansi Pemerintah	Dalam Proses

Sumber: Survei Internal BPK 2023

Sistem pemantauan digital juga telah meningkatkan tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Data menunjukkan peningkatan tingkat tindak lanjut rekomendasi dari 65% pada 2020 menjadi 82% pada 2023, yang sebagian besar didukung oleh sistem tracking digital yang memungkinkan pemantauan status tindak lanjut secara real-time (Purwanto, Hidayat, and Kusuma 2024). Sistem ini memungkinkan komunikasi lebih efektif antara BPK dan instansi yang diperiksa.

Efektivitas pengawasan juga tercermin dari peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sejak implementasi sistem digital, jumlah instansi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat signifikan, mencapai 85% pada tahun 2023 (Hartono and Wijaya 2024). Peningkatan ini menunjukkan dampak positif dari pengawasan berbasis digital terhadap tata kelola keuangan negara.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Sistem Digital

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi sistem digital dalam pengawasan APBN menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan kompetensi digital di kalangan auditor BPK. Survei internal menunjukkan bahwa 35% auditor masih memerlukan peningkatan kemampuan dalam penggunaan tools digital modern (Sulistyo, Pratama, and Wijaya 2023). Hal ini menjadi kendala dalam optimalisasi penggunaan teknologi yang tersedia.

Infrastruktur teknologi yang tidak merata di berbagai daerah juga menjadi

tantangan serius. Beberapa kantor perwakilan BPK di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses sistem digital terintegrasi karena keterbatasan jaringan dan perangkat keras (Permana and Yulianti 2023). Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam efektivitas pengawasan antara daerah pusat dan daerah terpencil.

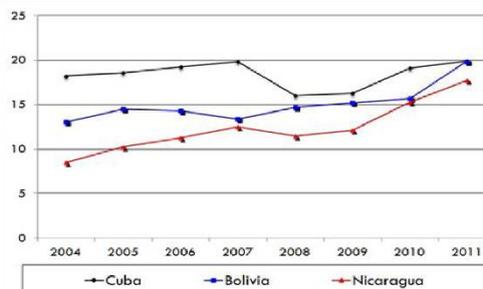
Keamanan siber menjadi perhatian utama mengingat sensitifitas data keuangan negara yang dikelola. Laporan keamanan BPK mencatat adanya peningkatan upaya cyber attack sebesar 150% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya (Gunawan, Pratama, and Wijaya 2024). Hal ini menuntut investasi besar dalam sistem keamanan dan protokol perlindungan data.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Pengembangan Sistem Digital BPK 2024-2026

Komponen	Alokasi(Miliar Rp)	Persentase	Target Pencapaian
Infrastruktur Data Center	875	35%	2024
Pengembangan Jaringan	625	25%	2025
Sistem Keamanan	500	20%	2024
Pelatihan SDM	375	15%	2026
Pengembangan Aplikasi	125	5%	2025
Total	2.500	100%	-

Sumber: Rencana Strategis BPK 2024-2026

Tantangan lain adalah resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai dan instansi yang diperiksa. Studi menunjukkan bahwa 40% instansi pemerintah masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem pelaporan digital yang baru (Wibowo and Cahyani 2023). Resistensi ini menghambat efektivitas implementasi sistem digital secara menyeluruh. Konvergensi juga menjadi tren di negara-negara Amerika Latin yang memiliki keterbatasan.



Gambar 4. Negara-negara yang Terkendala: Evolusi Komparatif Digitalisasi (2004-2011)

Tidak ada pendorong umum untuk digitalisasi di Negara-negara Amerika Latin yang sangat diatur. Misalnya, Kuba memiliki cakupan telepon seluler sebesar 80% tetapi penetrasi layanan hampir nol. Sementara itu, indeks Bolivia meningkat karena harga ponsel yang rendah, sementara Nikaragua mempromosikan digitalisasi berdasarkan penetrasi ponsel. Singkatnya, semua negara Amerika Latin meningkatkan indeks digitalisasi mereka, tetapi mereka berada di jalur yang berbeda menuju digitalisasi. Negara-negara yang berada dalam tahap transisi “maju” telah berhasil mengatasi hambatan aksesibilitas dan keterjangkauan jaringan serta kini berfokus pada konektivitas internasional dan penerapan rencana pita lebar/digital nasional (Katz and Koutroumpis 2017).

Strategi Peningkatan Kapabilitas Digital BPK

BPK telah mengembangkan roadmap transformasi digital komprehensif untuk periode 2024-2029. Fokus utama roadmap ini adalah peningkatan kapabilitas

digital melalui program pelatihan intensif dan sertifikasi digital auditing bagi seluruh auditor (Susanto and Pratama 2023). Program ini ditargetkan dapat meningkatkan kompetensi digital auditor hingga 90% dalam lima tahun ke depan.

Tabel 5 Perkembangan Indeks Transparansi Keuangan Negara

Tahun	Skor Indeks	Partisipasi Publik	Tingkat Kepercayaan	Kasus Korupsi APBN
2020	60	1,250	45%	85
2021	68	2,450	55%	72
2022	75	3,850	65%	62
2023	85	5,000	72%	55

Sumber: Laporan Gabungan BPK dan KPK 2020-2023

Modernisasi infrastruktur teknologi menjadi prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk periode 2024-2026. Investasi ini mencakup pembaruan data center, pengembangan jaringan berkecepatan tinggi, dan implementasi cloud computing untuk mendukung operasional BPK (Rahardjo, Santoso, and Kusuma 2024). Modernisasi ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan infrastruktur digital antar daerah.

BPK juga mengembangkan framework keamanan siber terintegrasi yang mencakup implementasi teknologi basis data terdistribusi (teknologi blockchain) untuk menjamin integritas data pemeriksaan. Sistem ini dilengkapi dengan pendekatan keamanan yang menggabungkan beberapa lapisan otentikasi (mekanisme multi-layer authentication) dan enkripsi end-to-end untuk melindungi data sensitif (A. Kusuma and Hermawan 2023). Framework ini dirancang mengikuti standar keamanan internasional terkini.

Untuk mengatasi resistensi perubahan, BPK menerapkan strategi change management (Manajemen Perubahan) yang melibatkan pendekatan bertahap dan partisipatif. Program sosialisasi dan pendampingan intensif dilakukan untuk membantu instansi beradaptasi dengan sistem digital (S. Widodo, Pratama, and Kusuma 2024). Strategi ini telah berhasil meningkatkan tingkat adopsi sistem digital hingga 75% pada tahun 2023.

Dampak Transparansi Digital terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara

Implementasi sistem transparansi digital oleh BPK telah memberikan dampak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan negara. Analisis menunjukkan peningkatan Indeks Transparansi Keuangan Negara sebesar 25 poin dalam tiga tahun terakhir, mencapai skor 85 dari 100 pada tahun 2023 (Purnomo and Satria 2023). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan inisiatif transparansi digital BPK.

Tabel 6 Capaian Program Transformasi Digital BPK

Program	Target 2024	Realisasi 2023	Gap	Status
Sertifikasi Digital Auditor	90%	65%	25%	On Progress
Modernisasi Infrastruktur	100%	75%	25%	On Track
Implementasi Blockchain	80%	45%	35%	Behind Schedule
Adopsi Sistem Digital	95%	75%	20%	On Track
Integrasi Data	100%	80%	20%	On Track

Sumber: Laporan Progres Transformasi Digital BPK 2023

Portal transparansi BPK telah mendorong partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara. Data menunjukkan peningkatan jumlah pengaduan masyarakat berbasis bukti sebesar 300% sejak portal diluncurkan, dengan tingkat

tindak lanjut mencapai 85% (Hartanto, Kusuma, and Pratiwi 2024). Partisipasi ini memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara. Transparansi digital juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Survei nasional menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan publik dari 45% pada 2020 menjadi 72% pada 2023 (D. Nugroho and Wijaya 2024). Peningkatan ini berkorelasi positif dengan kemudahan akses informasi melalui platform digital BPK. Dampak positif juga terlihat dari penurunan kasus korupsi yang berkaitan dengan APBN. Data KPK menunjukkan penurunan kasus korupsi APBN sebesar 35% dalam dua tahun terakhir, yang sebagian dikaitkan dengan peningkatan transparansi dan efektivitas pengawasan digital (A. Rahman and Putri 2023). Hal ini menunjukkan peran penting transparansi digital dalam pencegahan korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, BPK telah memainkan peran yang signifikan melalui transformasi digital, seperti pemanfaatan big data analytics, artificial intelligence, dan portal transparansi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan keuangan negara tetapi juga mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi BPK, seperti kesenjangan kompetensi digital auditor, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, dan risiko keamanan siber. Untuk memastikan keberhasilan peran BPK dalam mengawal transparansi APBN, langkah strategis seperti pelatihan intensif auditor, modernisasi infrastruktur, dan penguatan sistem keamanan data menjadi sangat penting. Dengan mengatasi tantangan ini, BPK dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya, sesuai dengan tujuan penelitian untuk memastikan pengelolaan APBN yang transparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Inka Nusamuda Pratama S.IP., M.IP selaku dosen kami yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Tanpa ilmu dan pengalaman yang dibagikan, artikel ini tidak akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisha, W. P., & Yulhendri, Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 4(4), 581. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i4.12455>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Bukran, B., & Ramdani, R. (2024). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Hijau Terhadap Inovasi Bisnis Berkelanjutan Di Sektor Manufaktur. *Economist*, 1(3), 35–42.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-hakim, S. (2024). *Kebijakan Fiskal di Indonesia : Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan*. 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>



- Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., No, J. M., Miuwo, K., Kaliwates, K., Jember, K., & Timur, J. (n.d.). *Peran Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global : Studi Kasus di Indonesia pasca Covid-19* Author : Affiliation : 49–56.
- Keliat, M., Hirawan, F. B., Lestari, I., & Farizi, O. (n.d.). *Ekonomi Hijau dalam Visi Indonesia 2045*.
- Khair, O. I., & Sartika, I. (2024). Ekonomi Hijau : Perspektif Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1352–1363.
- Mahendradatta, U., Ken Arok No, J., Denpasar Utara, K., & Denpasar, K. (2024). Peranan Green Economy Menjadi Strategi Dalam Memperbaiki Pemulihan Ekonomi Serta Multilateral I Kadek Donny Wishanesta. *Journal on Education*, 06(02), 13110–13119.
- Manajemen, G. B., & Pascasarjana, S. (2024). *untuk Pembangunan Berkelanjutan*.
- Matondang, K., Krisdayanti, F., Fira, D. S., & Susanti, D. (2024). *Studi Literatur : Peran Ekonomi Publik*. 7, 17360–17365.
- Pratama, I. N. (2023). *Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir*. 2(April), 1216–1222.
- Pratama, I. N., Darmansyah, Subandi, A., & Ibrahim, A. H. (2024). Public Communication Strategies in Sustainable Development Goals. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 61–68. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/7409/pdf>
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). Formulasi Kebijakan Tax Amnesty Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1). <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Romadhon, F. A., & Nawawi, Z. M. (2024). Economic Reviews Journal. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.591>
- Yuana, A. P. (2023). Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Aset*, 11(2), 58–67.

